



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, sehingga perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2016;

1911

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
dan
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal I diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp. 1.557.469.390.399,61 (satu triliun lima ratus lima puluh tujuh milyar empat ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan koma enam satu rupiah) berkurang sejumlah Rp. Rp. 133.295.085.005,48 (seratus tiga puluh tiga milyar dua ratus sembilan puluh lima juta delapan puluh lima ribu lima koma empat delapan rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.424.174.305.394,13 (satu triliun empat ratus dua puluh empat milyar seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh tiga ratus Sembilan puluh empat koma satu tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan	
a. Semula	Rp. 1.490.761.790.629,61
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (108.481.261.984,12)</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 1.382.280.528.645,49
2. Belanja	
a. Semula	Rp. 1.548.844.390.399,61
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (161.293.165.005,48)</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	<u>Rp. 1.387.551.225.394,13</u>
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. (5.270.696.748,64)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 66.707.599.770,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (24.813.823.021,36)</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 41.893.776.748,64
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 8.625.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 27.998.080.000,00)</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	<u>Rp. 36.623.080.000,00</u>

12
9
71

Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan

Rp. (5.270.696.748,64)
Rp. 0,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- a. Pendapatan asli daerah
- 1) Semula Rp. 132.323.164.813,71
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 4.314.406.696,78
- Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp. 136.637.571.510,49
- b. Dana perimbangan
- 1) Semula Rp. 1.208.962.825.500,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (124.373.650.400,00)
- Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan Rp. 1.084.589.175.100,00
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- 1) Semula Rp. 149.475.800.315,90
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 11.577.981.719,10
- Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 161.053.782.035,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

- a. Pajak daerah
- 1) Semula Rp. 87.781.508.500,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (3.000.000.000,00)
- Jumlah pajak daerah setelah Perubahan Rp. 84.781.508.500,00
- b. Retribusi daerah
- 1) Semula Rp. 7.565.488.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 129.928.555,82
- Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan Rp. 7.695.416.555,82
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- 1) Semula Rp. 2.750.000.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.534.943.173,89
- Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 4.284.943.173,89

Handwritten signature or initials in blue ink.

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah			
1) Semula	Rp.	34.226.168.313,71	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>5.649.534.967,07</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.		39.875.703.280,78
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:			
a. Dana bagi hasil			
1) Semula	Rp.	50.421.469.500,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(18.642.611.500,00)</u>	
Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan	Rp.		31.778.858.000,00
b. Dana alokasi umum			
1) Semula	Rp.	787.062.196.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(4.305.270.000,00)</u>	
3) Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan	Rp.		782.756.926.000,00
c. Dana alokasi khusus			
1) Semula	Rp.	172.027.610.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(16.890.642.000,00)</u>	
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan	Rp.		155.136.968.000,00
d. Dana alokasi khusus Non Fisik			
1) Semula	Rp.	199.451.550.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(84.535.126.900,00)</u>	
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan	Rp.		114.916.423.100,00
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:			
a. Hibah			
1) Semula	Rp.	700.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>29.123.080.000,00</u>	
Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan	Rp.		29.823.080.000,00
b. Dana Darurat			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp.		0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak			
1) Semula	Rp.	66.564.316.315,90	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(30.023.898.280,90)</u>	
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan	Rp.		36.540.418.035,00

d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan Rp. 0,00

e. Bantuan keuangan dari Propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 12.478.800.000,00

Jumlah bantuan keuangan dari Propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan Rp. 12.478.800.000,00

f. Pendapatan Lainnya

1) Semula Rp. 5.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (0,00)

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. 5.000.000.000,00

g. Dana Desa

1) Semula Rp. 77.211.484.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. 77.211.484.000,00

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 829.131.022.260,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (29.520.078.166,00)

Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan Rp. 799.610.944.094,00

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp. 719.713.368.139,61
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (131.773.086.839,48)

Jumlah belanja langsung setelah Perubahan Rp. 587.940.281.300,13

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp. 666.471.709.995,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (30.493.458.166,00)

Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp. 635.978.251.829,00

b. Belanja bunga			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah belanja bunga setelah Perubahan	Rp.		0,00
c. Belanja subsidi			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan	Rp.		0,00
d. Belanja hibah			
1) Semula	Rp.	8.344.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>700.000.000,00</u>	
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan	Rp.		9.044.000.000,00
e. Belanja bantuan sosial			
1) Semula	Rp.	1.500.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp.		1.500.000.000,00
f. Belanja bagi hasil			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan	Rp.		0,00
g. Belanja bantuan keuangan			
1) Semula	Rp.	144.772.114.200,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>756.800.000,00</u>	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan	Rp.		145.528.914.200,00
h. Belanja tidak terduga			
1) Semula	Rp.	8.043.198.065,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(483.420.000,00)</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp.		7.559.778.065,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:			
a. Belanja pegawai			
1) Semula	Rp.	54.318.693.350,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(5.654.661.150,00)</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp.		48.664.032.200,00

R
A

b. Belanja barang dan jasa		
1) Semula	Rp. 241.832.523.818,61	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (18.404.728.933,48)</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan		Rp. 223.427.794.885,13
c. Belanja modal		
1) Semula	Rp. 423.562.150.971,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (107.713.696.756,00)</u>	
Jumlah belanja modal setelah Perubahan		Rp. 315.848.454.215,00

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:		
a. Penerimaan sejumlah		
1) Semula	Rp. 66.707.599.770,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (24.813.823.021,36)</u>	
Jumlah penerimaan setelah Perubahan		Rp. 41.893.776.748,64
b. Pengeluaran sejumlah		
1) Semula	Rp. 8.625.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 27.998.080.000,00</u>	
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 36.623.080.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:		
a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah		
1) Semula	Rp. 66.707.599.770,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (24.813.823.021,36)</u>	
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan		Rp. 41.893.776.748,64
b. Pencairan dana cadangan sejumlah		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan		Rp. 0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah		
1) Semula	Rp. 0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan		Rp. 0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan		
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah	Rp.	0,00
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan		
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah	Rp.	0,00
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah Perubahan		0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan		
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah	Rp.	0,00
1) Semula	Rp.	8.375.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>28.248.080.000,00</u>
Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan		36.623.080.000,00
c. Pembayaran pokok utang sejumlah	Rp.	
1) Semula	Rp.	250.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan		
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah	Rp.	(250.000.000,00)
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah Perubahan		0,00

5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Uraian lebih lanjut tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keseluruhan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

6. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Di tetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 31 Oktober 2016

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 31 Oktober 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2016 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA, PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (5/2016)

BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI